

KENAIKAN UPAH MINIMUM SEBAGAI SARANA PENGENTASAN KEMISKINAN

Joko Susanto¹, Windyastuti²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Yogyakarta
¹jk.susanto.68@gmail.com, ²windyastuti@upnyk.ac.id

Diterima: Agustus 2022; Disetujui: September 2023

Abstract. Poverty alleviation is one measure of the success of economic development; therefore, this study analyzes the link between the minimum wage and the poverty rate. This study uses secondary data, which includes poverty rate, regency/city minimum wage, economic growth, unemployment rate, and length of road in the Greater Solo. The study period covers conditions from 2010 to 2020. Secondary data was analyzed using a panel data regression model based on Fully Modified Ordinary Least Square (FMOLS) estimation. Primary data from interviews with some development economists supplement the regression results. Preliminary data analysis utilized the Cross-Impact Matrix Multiplication Applied to Classification (MICMAC) method to analyze critical variables in poverty alleviation. The results showed increased regency/city minimum wage is followed by decreased poverty. Meanwhile, an increase in the open unemployment rate impacts an increase in the poverty rate. However, economic growth and the road length do not affect the Greater Solo area's poverty level. Furthermore, the results of the MICMAC analysis show a strong influence of the regency/city minimum wage and the open unemployment rate on the poverty rate. Meanwhile, economic growth and road length do not strongly influence the poverty rate.

Keywords: economic growth, minimum wage, poverty, unemployment.

Abstraksi. Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan, sehingga studi ini menganalisis kaitan antara upah minimum dengan tingkat kemiskinan. Studi ini menggunakan data sekunder yang mencakup tingkat kemiskinan, upah minimum kabupaten/kota (UMK), pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan panjang jalan di kawasan Solo Raya. Periode penelitian mencakup kondisi tahun 2010 sampai dengan 2020. Data sekunder dianalisis dengan model regresi data panel berdasar estimasi Fully Modified Ordinary Least Square (FMOLS). Hasil analisis data sekunder dilengkapi dengan data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan sejumlah ahli ekonomi pembangunan. Analisis data primer dilakukan berdasar metode Cross-Impact Matrix Multiplication Applied to Classification (MICMAC) untuk menganalisis variabel kunci dalam pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) Solo Raya diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan. Sementara itu, kenaikan tingkat pengangguran terbuka berdampak pada kenaikan tingkat kemiskinan. Adapun pertumbuhan ekonomi dan panjang jalan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di kawasan Solo Raya. Selanjutnya hasil analisis MICMAC menunjukkan adanya pengaruh yang kuat dari variabel upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan. Sementara itu pertumbuhan ekonomi dan panjang jalan tidak mempunyai pengaruh kuat terhadap tingkat kemiskinan.

Kata kunci: kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, upah minimum.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah klasik di samping masalah pengangguran dan ketimpangan. Hampir semua daerah menghadapi masalah ini

termasuk wilayah Solo Raya yang merupakan daerah Eks Karesidenan Surakarta. Pada tahun 2022, di sejumlah kabupaten di wilayah Solo Raya tingkat kemiskinan masih di atas 10 persen.

Kemiskinan merujuk pada penduduk yang memiliki nilai pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan. Jumlah barang baik makanan maupun non-makanan yang mereka konsumsi terlalu sedikit sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum.

Masalah kemiskinan bersifat kompleks dan berkaitan dengan berbagai faktor seperti pendapatan, pengangguran, akses terhadap barang dan jasa, geografis dan kondisi lingkungan. Rendahnya pendapatan menyebabkan suatu keluarga tidak mampu memenuhi batas minimum konsumsi baik makanan maupun non-makanan sehingga mereka termasuk dalam kelompok miskin. Sebagian besar pendapatan keluarga miskin berasal dari upah. Keluarga miskin tidak memiliki aset yang dapat diberdayakan sebagai sumber pendapatan. Upah rendah menyebabkan, keluarga miskin kesulitan untuk mencapai taraf hidup sejahtera. Pemerintah berupaya mengatasi masalah ini dengan pemberlakuan upah minimum guna meningkatkan pendapatan (Trimaya, 2014). Peningkatan pendapatan ini membantu mengentaskan kemiskinan melalui berbagai cara. Kenaikan pendapatan dapat dipergunakan untuk meningkatkan pendidikan (Jadoon & Sarwar, 2020), meningkatkan kesehatan (Kaestner, 2018) dan mempertahankan standar hidup sehingga mereka terlepas dari masalah kemiskinan (Kurniawati et al., 2017).

Walaupun demikian, hasil kajian empiris menunjukkan dampak upah minimum terhadap kemiskinan berbeda-beda. Beberapa studi menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum mendorong pengentasan kemiskinan, terutama bagi orang yang menerima upah minimum (Gindling, 2018; Sotomayor, 2021; Trimaya, 2014). Namun, penelitian lain menemukan bahwa upah minimum bukan sarana yang tepat untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat (Jadoon et al., 2021; Nwude, E, 2013; Yamada, 2016).

Trimaya (2014) menganalisis sistem pengupahan di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa upah minimum berfungsi sebagai jaring pengaman sosial dan merupakan aspek penting guna mewujudkan hubungan industrial yang kondusif antara pekerja dan pengusaha. Sementara itu, Gindling (2018) mengkaji penerapan upah minimum di sejumlah negara berkembang. Hasil kajian menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum mengurangi kemiskinan walaupun dampak tersebut tidak terlalu besar. Hal ini dikarenakan sebagian pekerja tidak tercakup dalam undang-undang upah minimum. Selanjutnya Sotomayor, (2021) mengkaji kaitan antara upah minimum dengan kemiskinan dan ketimpangan di Brasil. Studi ini menemukan bahwa dalam 3 (tiga) bulan sejak kenaikan upah minimum, kemiskinan dan ketimpangan menurun sebesar 2,8 persen dan 2,4 persen.

Sebaliknya, hasil penelitian Egunjobi, (2014) di Nigeria menunjukkan hasil berbeda. Besaran gaji yang diterima pekerja sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Upah minimum yang berlaku tidak memadai untuk mewujudkan keberlanjutan peningkatan pendapatan keluarga. Hasil penelitian ini didukung oleh temuan Yamada (2016) yang menunjukkan kecilnya dampak peraturan upah minimum pada peningkatan taraf hidup dan penurunan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Adapun hasil penelitian Jadoon et al. (2021) di sejumlah negara Asia menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum saja tidak mampu mendorong penurunan tingkat kemiskinan sosial. Pengentasan kemiskinan memerlukan kebijakan tambahan untuk mengurangi kemiskinan non-ekonomi.

Masalah kemiskinan juga berkaitan dengan pengangguran. Penganggur tidak berkontribusi dalam proses penciptaan nilai

tambah. Sebagai konsekuensinya, penganggur juga tidak memperoleh upah. Apabila penganggur tidak memiliki sumber penghasilan lain di luar upah, maka tidak ada pendapatan yang diterimanya. Selama ini Indonesia tidak mengenal sistem bantuan sosial bagi pengangguran (*unemployment benefit*). Sistem kartu Prakerja yang dirilis pemerintah terlalu banyak menekankan pada aspek pelatihan. Pelatihan saja tidak cukup apabila calon pekerja tidak memperoleh pekerjaan atau tidak mampu menjalankan melakukan usaha (Andina, 2022). Tidak adanya pendapatan menyebabkan penganggur mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka tidak mampu memenuhi tingkat konsumsi minimum sehingga termasuk dalam kelompok miskin.

Sejumlah peneliti telah mengkaji kaitan antara pengangguran dan kemiskinan. Hasil kajian menunjukkan temuan yang beragam. Sejumlah peneliti menyatakan bahwa pengangguran menyebabkan terjadinya kemiskinan. Kenaikan tingkat pengangguran berdampak pada kenaikan angka kemiskinan (Egunjobi, 2014; Rohmah et al., 2021). Sementara itu sejumlah peneliti lain menyatakan bahwa pengangguran bukan penyebab timbulnya kemiskinan (Hanifah & Hanifa, 2021; Siregar & Batubara, 2022).

Temuan Egunjobi (2014) menunjukkan adanya suatu paradox bahwa Nigeria merupakan negara kaya, tetapi menghadapi masalah kemiskinan tinggi. Dengan pendekatan ekonometri, penelitian Egunjobi (2014) mengungkapkan bahwa pengangguran berdampak pada tingginya kemiskinan di Nigeria. Kenaikan tingkat pengangguran berdampak pada kenaikan kemiskinan. Demikian pula hasil penelitian Rohmah et al. (2021) menunjukkan pengangguran terbuka berkontribusi pada tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi. Jika peluang mendapatkan pekerjaan rendah,

maka hal ini menyebabkan terjadinya pengangguran. Pengangguran berdampak penurunan pendapatan sehingga sejumlah penduduk masuk dalam kelompok miskin. Sebaliknya, berkurangnya pengangguran berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

Sebaliknya, temuan Hanifah dan Hanifa (2021) menyatakan tingkat pengangguran tidak berkontribusi pada kemiskinan. Hal ini dikarenakan sebagian besar penganggur merupakan pekerja terdidik. Pada umumnya penganggur terdidik bukan berasal dari keluarga miskin. Mereka masih dapat memenuhi kebutuhannya walaupun sedang menganggur. Temuan ini didukung oleh Siregar dan Batubara (2022) yang mengkaji dampak pengangguran pada kemiskinan di Mandailing Natal dengan menggunakan analisis regresi. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengangguran bukan penyebab masalah kemiskinan di Mandailing Natal. Kenaikan pengangguran tidak diikuti dengan peningkatan kemiskinan.

Pada umumnya kebijakan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan bertumpu pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kenaikan nilai tambah sehingga berdampak pada kenaikan pendapatan pemerintah melalui sistem perpajakan. Tingginya pendapatan pemerintah mendorong peningkatan anggaran bagi program pengentasan kemiskinan. Kenaikan anggaran ini memungkinkan program pengentasan kemiskinan dilaksanakan secara masif dan dengan intensitas lebih tinggi agar tingkat kemiskinan dapat diturunkan.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi juga disertai dengan kenaikan kesempatan kerja. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, diperlukan tambahan faktor produksi, di antaranya tenaga kerja. Kenaikan permintaan tenaga kerja menyebabkan tingkat pengangguran turun. Penurunan

pengangguran menyebabkan kelompok masyarakat yang dulunya tidak memiliki pendapatan, akibat menganggur, dapat berkontribusi dalam proses produksi sehingga memperoleh pendapatan. Pendapatan ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan konsumsi sehingga kesejahteraannya meningkat. Apabila tingkat konsumsi mereka sudah berada di atas konsumsi minimum, maka kelompok ini tidak lagi tergolong dalam kelompok miskin.

Hal ini sesuai dengan teori *trickle down effect* yang menjelaskan bahwa kemajuan yang dicapai sekelompok orang secara otomatis menciptakan lapangan kerja dan banyak peluang ekonomi lainnya (Larasati, 2017). Teori tersebut mengandung pengertian bahwa pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh aliran vertikal dari kaya ke miskin yang terjadi secara otomatis. Manfaat pertumbuhan ekonomi pertama-tama akan dirasakan oleh si kaya dan kemudian pada periode berikutnya si miskin akan mulai merasakan manfaatnya karena si kaya mulai membelanjakan hasil pertumbuhan ekonomi yang mereka terima.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan telah diteliti oleh sejumlah ahli ekonomi. Akan tetapi hasil kajian empiris menunjukkan dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan berbeda-beda. Sejumlah kajian empiris menunjukkan pertumbuhan ekonomi diikuti dengan penurunan kemiskinan (Dollar et al., 2016; Santos et al., 2019; Sehwat & Giri, 2018). Adapun sejumlah peneliti lain seperti Škare dan Družeta (2016), dan Fosu (2017) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan.

Dollar et al. (2016) menganalisis hubungan antara pertumbuhan rata-rata dan pertumbuhan kelompok termiskin. Mereka menemukan bahwa pendapatan di desil termiskin bervariasi dalam proporsi yang sama dengan pendapatan rata-rata. Kebijakan peningkatan pertumbuhan

ekonomi berpihak pada masyarakat miskin (*Pro Poor*) sehingga mampu meningkatkan pendapatan mereka yang berada di desil terendah. Sementara itu, hasil kajian Santos et al., (2019) menunjukkan bahwa kemiskinan bersifat multidimensi dan berkaitan erat dengan sejumlah variabel seperti ekspor, pangsa sektor industri dan jasa, dan pengendalian korupsi. Secara umum, pertumbuhan ekonomi mengurangi kemiskinan. Negara-negara dengan tingkat ekspor lebih tinggi, pangsa sektor industri dan jasa yang lebih tinggi, dan pengendalian korupsi yang lebih baik memiliki kemiskinan lebih rendah. Selanjutnya Sehwat dan Giri (2018) mengkaji dampak pembangunan keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan di India dengan alat analisis *Autoregressive Distribution Lag* (ARDL). Hasil kajian menunjukkan pembangunan keuangan dan pertumbuhan ekonomi membantu pengentasan kemiskinan, sedangkan ketimpangan pendapatan dan inflasi memperburuk kemiskinan.

Sebaliknya, penelitian Škare dan Družeta, (2016) yang menganalisis hubungan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan menunjukkan hasil berbeda. Hasil analisis mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak efektif untuk menurunkan angka kemiskinan. Pengaruh pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan tergantung pada cara pengukuran tingkat kemiskinan, daya serap kaum miskin, kecepatan dan pola pertumbuhan. Efek tetesan ke bawah (*trickle down effect*) masih perlu ditinjau kembali. Hasil kajian ini didukung Fosu (2017) yang mengkaji transformasi pertumbuhan ekonomi terhadap pengentasan kemiskinan di negara-negara berkembang, dengan penekanan pada peran ketimpangan pendapatan. Temuan penelitian ini menyatakan bahwa dampak pertumbuhan ekonomi pada tingkat

kemiskinan bergantung pada ketimpangan pendapatan. Tingginya ketimpangan ini membatasi efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan.

Sementara itu, Pham dan Riedel (2019) menganalisis dampak pertumbuhan ekonomi pada tingkat kemiskinan di Vietnam. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor industri dan sektor pertanian berdampak besar terhadap pengurangan kemiskinan. Sebaliknya, pertumbuhan sektor jasa justru mendorong naiknya angka kemiskinan.

Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Arham et al., (2020) yang menganalisis kinerja sektor pertanian dalam menurunkan tingkat kemiskinan pedesaan di Indonesia. Hasil analisis mengungkapkan bahwa peningkatan pangsa sektor pertanian justru mendorong kenaikan jumlah penduduk miskin di pedesaan. Kontribusi sektor pertanian umumnya tinggi, akan tetapi nilai tambah dan harga produk pertanian yang sangat rendah memperburuk tingkat kemiskinan pedesaan. Di sisi lain, pembiayaan pertanian belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Upaya lain yang ditempuh pemerintah dalam pengentasan kemiskinan adalah melalui pembangunan infrastruktur fisik. Salah satu wujud infrastruktur fisik adalah pembangunan jalan yang menghubungkan wilayah satu dengan wilayah lainnya. Adanya prasarana jalan mendorong kemajuan ekonomi. Konektivitas wilayah mendorong kelancaran lalu lintas dan perdagangan antar daerah. Setiap daerah akan berupaya untuk mengembangkan perekonomiannya menurut potensi yang ada sehingga suatu daerah akan memiliki keunggulan pada komoditas tertentu untuk selanjutnya diperdagangkan dengan komoditas dari daerah lain. Aktivitas perdagangan, sebagai dampak dari adanya konektivitas wilayah, mendorong kenaikan

pendapatan bagi para pihak yang terlibat dalam aktivitas ini. Kenaikan pendapatan mendorong mereka terlepas dari masalah kemiskinan.

Hasil kajian empiris menunjukkan dampak pembangunan infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan berbeda-beda. Sejumlah penelitian menunjukkan pembangunan infrastruktur jalan mampu mengurangi kemiskinan (Egunjobi, 2014; Pramono & Marsisno, 2018). Sementara itu, hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa pembangunan jalan tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan (Ambia & Sujarwoto, 2018; Prawesti & Hermawan, 2017; Sari, 2018).

Hasil penelitian Egunjobi (2014) di Nigeria menyatakan bahwa investasi pemerintah pada infrastruktur dan investasi sumber daya manusia memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Kenaikan investasi infrastruktur dan sumber daya manusia diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan. Sementara itu Pramono dan Marsisno (2018) mengkaji pengaruh infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur listrik, kesehatan, sanitasi, dan gedung sekolah berpengaruh negatif terhadap persentase penduduk miskin. Tingkat kemiskinan tinggi terjadi di sejumlah daerah yang masih kekurangan infrastruktur.

Sebaliknya, penelitian Prawesti dan Hermawan (2017) yang mengkaji pembangunan infrastruktur dan penanggulangan kemiskinan di Jawa menunjukkan bahwa pembangunan jalan tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan. Hal ini dikarenakan orang kaya memanfaatkan sistem transportasi lebih efektif daripada orang miskin. Hasil penelitian ini didukung oleh temuan Sari, (2018) tentang dampak pembangunan infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan di DI. Yogyakarta yang menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak berdampak pada tingkat kemiskinan. Pembangunan infrastruktur saja tidak dapat mengurangi kemiskinan. Infrastruktur memerlukan input

pelengkap seperti kepemilikan aset dan sumber daya manusia berkualitas.

Selanjutnya hasil kajian Ambia dan Sujarwoto (2018) di Indonesia juga menunjukkan hasil serupa. Pengeluaran untuk infrastruktur jalan tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Pembangunan infrastruktur jalan tidak dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat miskin.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks sehingga sejumlah penelitian memberikan hasil berbeda-beda. Di samping faktor-faktor ekonomi, kemiskinan juga berkaitan dengan faktor-faktor lain seperti budaya dan kondisi lingkungan suatu masyarakat (Adhi et al., 2016). Secara umum, kondisi budaya dan lingkungan masyarakat di wilayah Solo Raya memiliki corak budaya yang menganut pada tata nilai budaya Surakarta sehingga budaya masyarakat tersebut tidak terlalu beragam satu sama lain. Untuk itu studi ini memfokuskan pada variabel ekonomi guna mengkaji kemiskinan di wilayah Solo Raya. Terdapat sejumlah variabel ekonomi yang diduga memiliki kaitan dengan tingkat kemiskinan. Variabel-variabel tersebut meliputi upah minimum, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan kondisi infrastruktur jalan. Di samping faktor besaran variabel ekonomi, maka pola hubungan antar variabel ekonomi ikut menentukan pengaruh variabel ekonomi tersebut terhadap tingkat kemiskinan. Apabila suatu variabel ekonomi cenderung berasosiasi dengan variabel ekonomi lainnya, maka variabel tersebut tidak akan berpengaruh signifikan pada tingkat kemiskinan. Dengan demikian kebijakan pemerintah perlu difokuskan pada variabel strategis yang berdampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pertimbangan lain dalam penentuan wilayah Solo Raya sebagai obyek penelitian dikarenakan angka kemiskinan di beberapa kabupaten di

wilayah Solo Raya melebihi angka kemiskinan di Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Data sekunder meliputi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, upah minimum, pertumbuhan ekonomi dan panjang jalan di Kawasan Solo Raya. Data sekunder meliputi publikasi tahun 2010 sampai dengan tahun 2021. Pemilihan tahun 2010 sebagai titik awal penelitian berdasarkan pertimbangan pada tahun tersebut terjadi krisis ekonomi yang berdampak pada kinerja perekonomian termasuk tingkat pengangguran. Sementara itu, titik akhir penelitian di tahun 2021 karena publikasi pada tahun tersebut adalah yang terbaru. Pemilihan lokasi yang meliputi Kawasan Solo Raya dikarenakan perekonomian kawasan ini relatif maju lebih baik, tetapi tingkat kemiskinan di sejumlah kabupaten di kawasan ini masih relatif tinggi.

Keterbatasan pada data sekunder menyebabkan terjadinya kesulitan untuk memetakan pola hubungan antar variabel ekonomi. Untuk itu, studi ini dilengkapi dengan data primer guna memetakan pola hubungan antar variabel ekonomi sehingga dapat diidentifikasi variabel strategis yang mempengaruhi kemiskinan di Solo Raya. Data primer diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner dan wawancara kepada sejumlah ahli ekonomi pembangunan. Akan tetapi sampai dengan penelitian ini mulai ditulis, hanya sejumlah 7 orang ahli ekonomi pembangunan yang memberikan konfirmasi kesediaan. Setiap ahli ekonomi pembangunan diminta memberikan pendapatnya tentang kemiskinan di Solo Raya beserta pengaruh dan ketergantungan di antara variabel-variabel penelitian yang mencakup kemiskinan, upah minimum, tingkat pengangguran, pertumbuhan

ekonomi dan panjang jalan. Berdasar pendapat dari 7 (tujuh) ahli tersebut dilakukan analisis *Cross-Impact Matrix Multiplication Applied to Classification* (MICMAC) untuk mengidentifikasi variabel-variabel utama yang bersifat *influential* (mempengaruhi) dan *dependent* (dipengaruhi) dan memetakan hubungan antar variabel dalam menjelaskan suatu sistem.

Variabel Operasional

Definisi operasional tersebut dijelaskan sebagai berikut.

- a. Tingkat kemiskinan merupakan persentase penduduk yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan (persen).
- b. Upah Minimum adalah upah minimum kabupaten/kota yang berlaku di setiap kabupaten/kota di kawasan Solo Raya (ribu rupiah).
- c. Pertumbuhan ekonomi adalah persentase kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di setiap kabupaten/kota di kawasan Solo Raya (persen).
- d. Tingkat pengangguran merujuk tingkat pengangguran terbuka (TPT) yaitu persentase jumlah penduduk usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan (persen)
- e. Panjang jalan adalah rasio panjang jalan (mencakup jalan kabupaten, provinsi dan nasional) terhadap luas wilayah di setiap kabupaten/kota di kawasan Solo Raya (kilometer)

Alat Analisis

Penelitian ini menggunakan regresi data panel dinamis untuk menganalisis data sekunder. Metode ini telah berkembang jauh secara teknis dan semakin banyak digunakan dalam penelitian sosial (Gil-garcía & Puroncid, 2014). Analisis ini menentukan apakah upah minimum, pengangguran terbuka,

pertumbuhan ekonomi, dan panjang jalan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Solo Raya. Sebelum analisis lebih lanjut, uji kointegrasi harus digunakan untuk menentukan apakah terdapat hubungan ekuilibrium jangka panjang antara variabel-variabel dalam model regresi. Uji kointegrasi menggunakan model Kao. Jika hasil pengujian ini menunjukkan adanya kointegrasi antar variabel dalam model, maka langkah selanjutnya adalah analisis regresi. Analisis ini menggunakan variabel tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan panjang jalan sebagai kovariat untuk memperkirakan dampak upah minimum terhadap tingkat kemiskinan. Analisis regresi dilakukan dengan menggunakan metode estimasi *Fully Modified Ordinary Least Squares* (FMOLS). Metode ini lebih unggul dari metode OLS (Arize et al., 2015).

Model regresi dinyatakan dalam persamaan 1.

$$MISKIN_{it} = \beta_0 + \beta_1UMK_{it} + \beta_2TPT_{it} + \beta_3PE_{it} + \beta_4PJALAN_{it} + e_{it} \dots\dots (1)$$

Secara berurutan, MISKIN adalah tingkat kemiskinan (persen), UMK adalah upah minimum kabupaten/kota (ribu rupiah), TPT adalah tingkat pengangguran terbuka (persen), sedangkan PE adalah pertumbuhan ekonomi (persen), PJALAN adalah panjang jalan (kilometer) dan e adalah residual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran tentang variabel-variabel penelitian dijelaskan pada deskripsi statistik (Tabel 1). Paparan deskriptif menggunakan metode numerik untuk meringkas informasi tentang data penelitian. Probabilitas korelasi antar variabel dapat dideteksi berdasarkan studi deskripsi.

Tabel 1. Deskripsi Statistik Variabel Penelitian

	MISKIN	UMK	TPT	PE	PJALAN
Mean	12,425	1300,908	4,602	4,854	1,925
Median	12,555	1259,500	4,485	5,585	1,225
Maksimum	17,950	2054,040	8,730	6,700	7,930
Minimum	7,140	695,000	2,030	-1,870	0,550
Std. Dev.	2,544	436,812	1,609	2,078	1,816

Sumber: data primer (diolah)

Berdasarkan Tabel 1, tingkat kemiskinan tertinggi yang mencapai 17,950 persen terjadi di Klaten pada tahun 2011. Tingginya angka pengangguran ini diduga terkait dengan kondisi makro ekonomi sehingga hampir semua kabupaten dan kota di kawasan Solo Raya menghadapi masalah kenaikan angka kemiskinan. Sementara itu, tingkat kemiskinan terendah sebesar 7,140 persen terjadi di Sukoharjo tahun 2019 seiring dengan membaiknya kinerja perekonomian kawasan Solo Raya. Adapun upah minimum kabupaten/kota tertinggi sebesar 2,054 juta rupiah terjadi di Karanganyar pada tahun 2021. Hal ini diduga karena UMK di wilayah tersebut relatif tinggi dan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka tertinggi terjadi di Kota Solo tahun 2010 dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,73 persen. Kondisi ini diduga terkait dengan kinerja perekonomian akibat krisis dan tingginya tingkat pengangguran terdidik di kawasan perkotaan. Sebaliknya, tingkat pengangguran terbuka terendah terjadi di Boyolali tahun 2015 dengan besaran setinggi 2,030 persen. Rendahnya tingkat pengangguran terbuka ini diduga berkaitan dengan karakteristik perekonomian kabupaten tersebut yang banyak didominasi usaha mikro dan kecil yang bersifat padat karya.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 6,7 persen terjadi di Sragen pada tahun 2013. Kondisi perekonomian yang terus membaik, dan perekonomian domestik nasional yang

stabil mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah ini. Di sisi lain, laju pertumbuhan terendah sebesar -1,87 persen terjadi di Karanganyar pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 sehingga beberapa sektor ekonomi mengalami gangguan. Sementara itu, rasio panjang jalan tertinggi terjadi di Solo pada tahun 2017 dengan panjang jalan 7,93 km untuk setiap km² luas wilayah. Hal ini terkait kondisi Kota Solo sebagai kawasan perkotaan yang memiliki banyak infrastruktur. Sebaliknya, rasio panjang jalan terendah terjadi di Wonogiri pada tahun 2017 dengan panjang jalan 0,05 km untuk setiap km² luas wilayah. Rendahnya rasio panjang jalan ini terkait dengan kondisi wilayah Wonogiri yang relatif luas dan didominasi kawasan perdesaan.

Selanjutnya hasil uji kointegrasi menunjukkan bahwa nilai ADF sebesar -6,057 dan signifikan (Tabel 2). Dengan demikian terdapat hubungan sebab akibat jangka panjang antar variabel dalam model yang dibangun. Residual yang diperoleh dari estimasi model bersifat stasioner.

Tabel 2.
Hasil Uji Kointegrasi Berdasarkan Model Kao

	t-Statistik	Signifikansi
ADF	-6,057	0,000

Sumber: hasil olah data primer

Selain itu, metode FMOLS (*Fully Modified Ordinary Least Square*) menunjukkan bahwa variabel Upah

Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif terhadap angka kemiskinan. Solo Raya. Akan tetapi variabel pertumbuhan ekonomi dan panjang jalan tidak memberikan pengaruh signifikan.

Sebaliknya, R-squared sebesar 0,926 menunjukkan bahwa 92,6 persen variasi kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel dalam model, sedangkan 7,4 persen variasi kemiskinan dijelaskan oleh residual (Tabel 3).

Tabel 3. Hasil Estimasi

No.	Variabel	Koefisien	t-hitung
1	Upah Minimum	-0,003	-18,484*
2	Tingkat Pengangguran	0,119	2,121*
3	Pertumbuhan Ekonomi	-0,050	-1,309
4	Panjang Jalan	-0,166	-0,868
	R ²	0,926	

* signifikan ($\alpha=5\%$)

Sumber: hasil olah data primer

Variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota memiliki koefisien regresi negatif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar -0,003. Dengan demikian, menaikkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Angka kemiskinan akan menurun sebesar 0,003 persen apabila upah minimum kabupaten/kota naik sebesar Rp1.000. Kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) mendorong naiknya tingkat upah secara umum sehingga berdampak pada kenaikan pendapatan pekerja. Kenaikan pendapatan mendorong kenaikan konsumsi barang dan jasa. Apabila tingkat konsumsi sudah melebihi garis kemiskinan, maka mereka tidak lagi termasuk kelompok miskin.

Upah minimum kabupaten/kota yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan mengindikasikan bahwa mereka yang tergolong miskin adalah pekerja berupah rendah termasuk mereka yang berada pada sektor marjinal. Kenaikan upah minimum kabupaten/kota mendorong kenaikan pendapatan bagi kelompok miskin sehingga mereka mampu meningkatkan konsumsinya. Besaran *marginal propensity to consume* (MPC) kelompok miskin lebih

tinggi dari pada MPC kelompok kaya sehingga dampak kenaikan pendapatan terhadap konsumsi kelompok masyarakat miskin lebih besar daripada dampak yang sama pada kelompok masyarakat kaya. Kenaikan pendapatan mendorong kenaikan konsumsi sehingga pengeluaran konsumsi masyarakat miskin melebihi garis kemiskinan. Hal ini berarti mereka sudah tidak lagi tergolong dalam kelompok penduduk miskin. Temuan ini mendukung hasil penelitian Gindling (2018) yang menunjukkan penerapan upah minimum diikuti dengan penurunan kemiskinan. Hasil penelitian juga sejalan dengan temuan Sotomayor (2021) bahwa kenaikan upah minimum diikuti dengan penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Selanjutnya koefisien regresi variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) bertanda positif dan signifikan, dengan koefisien sebesar 0,119. Hal ini berarti kenaikan pengangguran terbuka (TPT) sebesar 1 persen akan berdampak pada kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 0,119 persen. Sebaiknya penurunan tingkat pengangguran diikuti dengan penurunan kemiskinan. Penurunan pengangguran menunjukkan semakin banyaknya angkatan

kerja yang mendapatkan pekerjaan. Mereka ikut serta dalam proses produksi sehingga mendapatkan upah. Upah merupakan sumber pendapatan dan mendorong kenaikan konsumsi. Kenaikan konsumsi ini akan mendorong masyarakat miskin terbebas dari masalah kemiskinan.

Penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan mengindikasikan bahwa kelompok penduduk miskin juga merupakan penganggur. Berbeda dengan negara-negara Barat, selama ini Indonesia tidak mengenal tunjangan sosial bagi penganggur (*unemployment benefit*) sehingga penganggur tidak memiliki penghasilan. Adapun program Kartu Prakerja yang akhir-akhir ini diperkenalkan masih memiliki banyak keterbatasan sehingga tidak dapat dijadikan tumpuan bagi penganggur untuk memenuhi kebutuhannya. Penurunan pengangguran menunjukkan bahwa kelompok miskin yang selama ini menganggur bisa mendapatkan pekerjaan yang dicarinya. Adanya mata pencaharian memungkinkan adanya kenaikan pendapatan bagi kelompok miskin sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila kebutuhan hidup telah terpenuhi maka tingkat kesejahteraan naik dan mereka tidak lagi tergolong dalam kelompok miskin. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Rohmah et al. (2021) bahwa berkurangnya pengangguran berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Sementara itu hasil penelitian berlawanan dengan temuan Siregar dan Batubara (2022) yang menyatakan pengangguran bukan penyebab masalah kemiskinan.

Sementara itu pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh pada angka kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan output ekonomi.

Peningkatan ini membutuhkan input tambahan, termasuk input tenaga kerja, sehingga lapangan kerja akan meningkat. Akan tetapi kenaikan output tidak hanya memerlukan tambahan pekerja saja tetapi juga tambahan modal. Hanya kelompok menengah ke atas yang memiliki modal dalam jumlah cukup sehingga mereka bisa ikut serta dalam proses produksi dan mendapatkan balas jasa dari aktivitas ekonomi dimaksud. Adapun kelompok miskin tidak memiliki modal sehingga mereka tidak bisa ikut serta dalam proses produksi. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi tidak berdampak pada tingkat kemiskinan.

Kenaikan output perekonomian diduga disertai dengan kemajuan teknologi yang mengarah pada teknologi padat modal sehingga kesempatan kerja yang tercipta tidak begitu besar. Aktivitas perekonomian yang mengarah pada teknologi padat modal hanya memerlukan sedikit tambahan tenaga kerja. Adapun karakteristik tenaga kerja yang diminta adalah pekerja dengan keahlian dan ketrampilan tinggi. Hal ini dikarenakan hanya pekerja dengan keahlian tinggi yang mampu menjalankan aktivitas ekonomi berbasis teknologi padat modal. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan kenaikan *employment* secara signifikan.

Terkait dengan teknologi padat modal, maka kenaikan *employment* ini akan diisi oleh pencari kerja dengan keahlian dan keterampilan tinggi. Pada umumnya mereka berasal dari keluarga menengah ke atas dengan latar belakang pendidikan lebih baik. Dukungan keuangan yang memadai memungkinkan mereka mengikuti berbagai pendidikan dan latihan sehingga keahliannya meningkat. Adapun kelompok miskin mengalami keterbatasan dana sehingga mereka tidak mampu mengakses berbagai sarana pendidikan dan latihan.

Walaupun di setiap kabupaten dan kota terdapat Balai Latihan Kerja (BLK), akan tetapi keterbatasan kapasitas dan macam pelatihan yang disediakan menyebabkan terbatasnya jumlah lulusan sekolah yang dapat ditampung pada lembaga tersebut. Keterbatasan dana menyebabkan kelompok miskin tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya pada jenjang pendidikan lebih tinggi sehingga mereka kalah bersaing kelompok menengah ke atas dengan latar belakang pendidikan lebih maju. Pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perubahan teknologi menuju teknologi padat modal mengakibatkan kelompok miskin tidak dapat berkontribusi dalam proses produksi sehingga mereka tidak memperoleh upah. Pertumbuhan ekonomi tidak berdampak pada tingkat kemiskinan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Fosu (2017) bahwa pertumbuhan ekonomi tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan. Sebaliknya, temuan penelitian ini berlawanan dengan temuan Santos et al., (2019) bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak pada penurunan kemiskinan.

Selanjutnya, peningkatan infrastruktur fisik yang ditandai dengan penambahan

panjang jalan tidak berdampak pada kemiskinan. Penambahan panjang jalan tidak diikuti dengan penurunan kemiskinan. Hal ini diduga akibat tambahan kebutuhan tenaga kerja hanya terjadi selama proses pembangunan infrastruktur tersebut.

Setelah infrastruktur jalan terbangun maka diharapkan lalu lintas perdagangan barang dan jasa akan meningkat sehingga mendorong peningkatan kesempatan kerja baru. Akan tetapi pembangunan infrastruktur jalan cenderung dinikmati oleh kelompok kaya yang memiliki sarana transportasi baik kendaraan roda dua maupun mobil. Kelompok miskin tidak memiliki sarana transportasi yang memadai sehingga manfaat infrastruktur jalan belum tentu dapat dinikmati oleh kelompok miskin. Dengan demikian pembangunan infrastruktur jalan tidak berdampak pada angka kemiskinan. Temuan ini didukung Ambia dan Sujarwoto (2018) yang mengungkapkan pembangunan infrastruktur jalan tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan. Hasil studi ini berlawanan dengan temuan Egunjobi (2014) bahwa pembangunan infrastruktur jalan mampu mengurangi kemiskinan.

Tabel 4. Identifikasi Nilai *Matrix Direct Influence* (MDI)

	Miskin	UMK	TPT	PE	Jalan
Miskin	0	1	1	1	0
UMK	3	0	2	1	0
TPT	3	1	0	1	0
PE	2	2	1	0	1
Jalan	1	0	1	2	0

Sumber : Data primer (diolah)

Selanjutnya, hasil analisis regresi sejalan dengan hasil olah data primer melalui analisis MICMAC. Analisis ini dilakukan melalui penilaian para ahli ekonomi pembangunan terhadap pola hubungan dan ketergantungan dari sejumlah variabel dalam model penelitian yang mencakup kemiskinan, upah minimum, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan panjang jalan. Para ahli memberikan

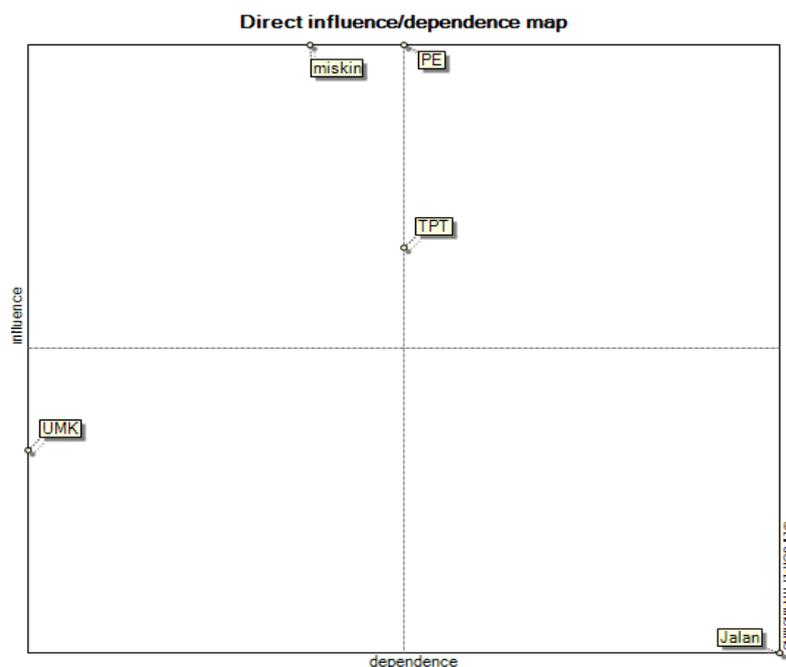
penilaian pengaruh tiap variabel terhadap variabel lainnya. Mereka memberikan penilaian dengan rentang skor 0 (tidak ada pengaruh) sampai dengan skor 3 (pengaruh kuat). Berdasar penilaian ini dapat diidentifikasi variabel-variabel yang bersifat *influential* (mempengaruhi) dan *dependent* (dipengaruhi). Apabila skor penilaian para ahli berbeda satu dengan lainnya, maka penentuan skor akhir dilakukan berdasar

kaidah modus (skor yang paling banyak muncul). Hasil penilaian dituangkan dalam *Matrix Direct Influence* (MDI) untuk melihat intensitas pengaruh langsung tiap variabel terhadap variabel lainnya (Tabel 4).

Berdasar baris ke 2 dari Tabel 4, maka variabel UMK berpengaruh intensitas kuat terhadap kemiskinan (skor 3), sedangkan intensitas pengaruhnya terhadap tingkat pengangguran adalah sedang (skor 2). Variabel UMK memiliki pengaruh dengan intensitas lemah terhadap pertumbuhan ekonomi (skor 1) dan tidak berpengaruh pada panjang jalan (skor 0). Selanjutnya berdasar kolom 2 terlihat bahwa variabel kemiskinan sangat bergantung pada UMK dan TPT (skor 3), bergantung dengan intensitas sedang terhadap PE (skor 2) dan dengan intensitas lemah terhadap panjang jalan (skor 1).

Pandangan ahli ekonomi pembangunan, sebagaimana dijelaskan dalam MDI, berpengaruh pada posisi variabel dalam peta pengaruh dan ketergantungan langsung. Berdasar besaran pengaruh dan ketergantungan, maka diklasifikasikan empat kuadran menurut kategori pengaruh

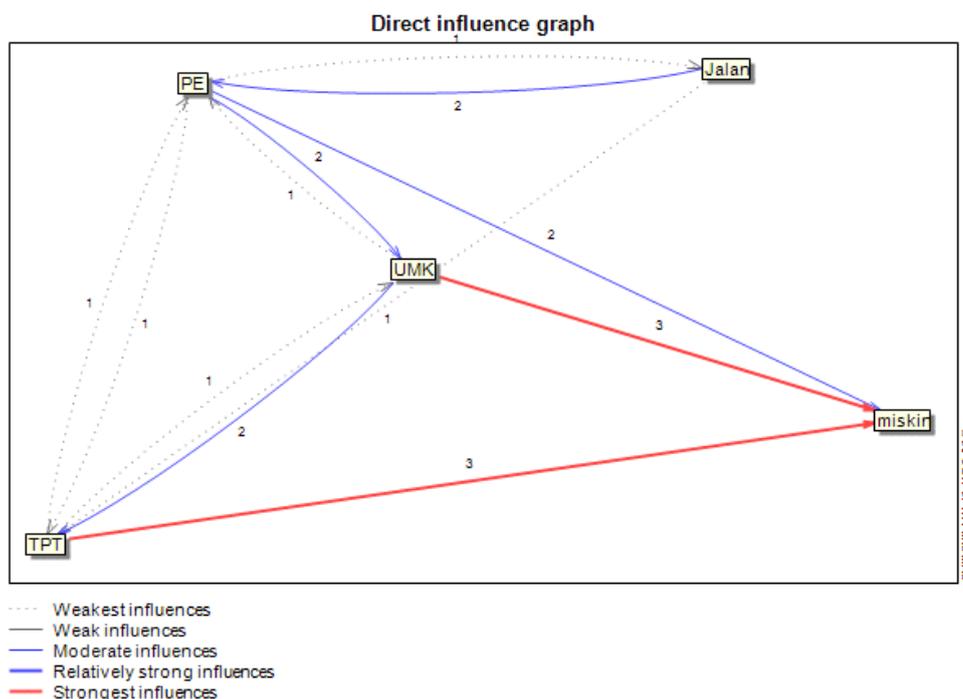
dan dependensi, yaitu meliputi variabel pengaruh (*influence*), variabel *relay*, variabel dependen, dan variabel otonom (Gambar 1). Variabel UMK berpengaruh yang kuat dan ketergantungan yang lemah. Variabel UMK merupakan variabel *influence* yang memiliki pengaruh kuat terhadap variabel lain. Sementara itu variabel pengangguran (TPT) dan pertumbuhan ekonomi (PE) memiliki pengaruh dan ketergantungan kuat. Hal ini berarti kedua variabel ini merupakan *relay variable*. Tingkat pengangguran (TPT) dan pertumbuhan ekonomi (PE) berpengaruh terhadap variabel lain, akan tetapi pada saat bersamaan juga dipengaruhi oleh variabel lain. Adapun variabel kemiskinan memiliki pengaruh rendah dan ketergantungan tinggi (variabel dependen). Hal ini berarti kemiskinan merupakan dampak dari suatu sistem. Tinggi rendahnya kemiskinan bergantung pada variabel lain dalam sistem. Selanjutnya variabel panjang jalan memiliki pengaruh dan ketergantungan rendah (variabel otonom). Dengan demikian intensitas pengaruh perubahan panjang jalan terhadap variabel lain relatif rendah.



Gambar 1. Pengkategorian Variabel Berdasarkan Intensitas Pengaruh dan Ketergantungan Langsung Terhadap Variabel Lain
Sumber: hasil olah data primer

Posisi setiap variabel dalam peta pengaruh dan ketergantungan menentukan pengaruh langsung antar variabel dalam penanggulangan kemiskinan di Solo Raya. Derajat pengaruh tersebut ditunjukkan dengan warna dan ketebalan garis yang menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya (Gambar 2). Model hubungan pengaruh langsung antar variabel pendukung terhadap hasil analisis regresi. Variabel upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan variabel yang memiliki pengaruh langsung yang kuat terhadap angka kemiskinan. Temuan ini mendukung hasil analisis regresi yang menunjukkan upah minimum dan tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Adapun pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan dengan intensitas

sedang. Sementara itu, variabel panjang jalan tidak memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat kemiskinan. Panjang jalan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan melalui variabel *intervening* yaitu pertumbuhan ekonomi. Kedua temuan ini juga mendukung hasil analisis regresi yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan panjang jalan tidak berdampak pada tingkat kemiskinan di Solo Raya. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Nugroho (2015) bahwa panjang jalan, transmisi listrik, distribusi air bersih, jumlah fasilitas kesehatan, dan jumlah sekolah berpengaruh terhadap angka kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel *intervening*. Dengan demikian kaitan antara infrastruktur dan kemiskinan bersifat tidak langsung.



Gambar 2. Hubungan Pengaruh Langsung Antar Variabel

Sumber: Hasil olah data primer

SIMPULAN

Keluarga miskin tidak memiliki sumber penghasilan lain di luar upah sehingga upah merupakan komponen pokok dari pendapatan mereka. Hal ini berarti kemiskinan berkaitan erat dengan tingkat

upah. Upah minimum kabupaten/kota (UMK) berdampak negatif pada angka kemiskinan di Solo Raya. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh positif terhadap angka kemiskinan. Akan tetapi pertumbuhan

ekonomi dan panjang jalan tidak berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi memerlukan tambahan kapital sehingga masyarakat miskin tidak bisa ikut serta. Adapun pembangunan infrastruktur jalan cenderung dinikmati oleh kelompok kaya yang memiliki sarana transportasi. Pembangunan infrastruktur jalan tidak berdampak pada kondisi kelompok miskin.

Selanjutnya penelitian ini juga dilengkapi dengan analisis MICMAC sehingga dapat diidentifikasi pola hubungan antar variabel. Beberapa variabel kemungkinan memiliki pola hubungan tidak langsung yang tidak dapat diidentifikasi berdasar analisis regresi. Hasil analisis MICMAC menunjukkan bahwa upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan variabel berpengaruh kuat secara

langsung terhadap angka kemiskinan. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai dampak kuat terhadap angka kemiskinan. Adapun variabel panjang jalan tidak memiliki dampak langsung pada angka kemiskinan. Panjang jalan berasosiasi dengan variabel pertumbuhan ekonomi sehingga tidak berdampak pada tingkat kemiskinan. Untuk itu pemerintah kabupaten/kota di kawasan Solo Raya perlu memperjuangkan kenaikan upah minimum sesuai dengan ketentuan pengupahan dari pemerintah pusat. Di samping itu, pemerintah juga perlu menekan tingkat pengangguran terbuka agar semakin banyak angkatan kerja yang bisa ikut serta dalam proses produksi. Kenaikan *employment* ini akan berdampak pada kenaikan pendapatan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan bisa diturunkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, M. K., Ardana, I. K., & Maduriana, I. M. (2016). Faktor-kaktor Penyebab Kemiskinan Kultural dan Model Pengentasan Berbasis Kearifan Lokal: Studi pada Masyarakat Miskin di Pegunungan Kintamani, Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 06(02), 229–246.
- Ambia, A. N., & Sujarwoto, N. I. (2018). Infrastructure Expenditure and Poverty Reduction In Indonesia. *Rjoas*, 4(April), 33–39.
- Andina, E. (2022). Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Program Kartu Prakerja di Provinsi Jawa Barat The Role of Subnational Government in the Implementation of Pre-Employment Card Program in West Java Province Pendahuluan Pandemi telah menyebabkan perubah- penerima. *Aspirasi: Jurnal Masalah Masalah Sosial*, 13(1), 37–57.
- Arham, M. A., Fadhli, A., & Dai, S. I. (2020). Does Agricultural Performance Contribute to Rural Poverty Reduction in Indonesia? *Jejak*, 13(1), 69–83. <https://doi.org/10.15294/jejak.v13i1.20178>
- Arize, A. C., Malindretos, J., & Ghosh, D. (2015). Purchasing Power Parity-Symmetry and Proportionality: Evidence from 116 countries. *International Review of Economics & Finance*, 37(C), 69–85.
- Dollar, D., Kleineberg, T., & Kraay, A. (2016). Growth Still Is Good for the Poor. *European Economic Review*, 81, 68–85.
- Egunjobi, T. A. (2014). Poverty and Unemployment Paradox in Nigeria. *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, 19(5), 106–116. <https://doi.org/10.9790/0837-1954106116>

- Fosu, A. K. (2017). Growth, Inequality, and Poverty Reduction in Developing Countries: Recent Global Evidence. *Research in Economics*, 71(2), 306–336. <https://doi.org/10.1016/j.rie.2016.05.005>
- Gil-garcía, J. R., & Puron-cid, G. (2014). Using Panel Data Techniques for Social Science Research: an Illustrative Case and Some Guidelines. *CIENCIA Ergo-Sum*, 21(3), 203–216.
- Gindling, T. H. (2018). Does Increasing The Minimum Wage Reduce Poverty in Developing Countries? *IZA World of Labor*, November, 1–10. <https://doi.org/10.15185/izawol.30.v2>
- Hanifah, S., & Hanifa, N. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lamongan. *Independent Journal of Economics*, 1(3), 191–206.
- Jadoon, A. ., Tanveer, A., Javed, M. ., & Sarwar, A. (2021). Minimum Wages and Poverty: A Cross-Country Analysis. *Asian Economic and Financial Review*, 11(8), 632–643. <https://doi.org/10.18488/JOURNAL.AEFR.2021.118.632.643>
- Jadoon, A. K., & Sarwar, A. (2020). Is Trade Liberalisation Pro-Poor in Pakistan? Evidence from Large-Scale Manufacturing. *Australian Economic Review*, 53(3), 360-394.
- Kaestner, G. W. D. D. R. (2018). Effects Of The Minimum Wage On Infant Health. *NBER Working Paper Series Effects*, 1–42.
- Kurniawati, A., Gunawan, B. T., & Indrasari, D. P. R. (2017). Dampak Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2006-2014. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Manajemen*, 17(2), 233. <https://doi.org/10.17970/jrem.17.170207.id>
- Larasati, D. (2017). Analisis Trickle Down Effect Sektor Pariwisata Kota Batu Tahun 2007-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(2), 1–9. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3644/3232>
- Nugroho, S. . (2015). Peran Infrastruktur Dasar Dalam Pengentasan Kemiskinan di indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 19(1), 27–44.
- Nwude, E. C. (2013). The Politics of Minimum Wage in Nigeria: the Unresolved Issues. *Asian Journal of Empirical Research*, 3(4), 477–492.
- Pham, T. H., & Riedel, J. (2019). Impacts of The Sectoral Composition of Growth on Poverty Reduction in Vietnam. *Journal of Economics and Development*, 21(2), 213–222. <https://doi.org/10.1108/jed-10-2019-0046>
- Pramono, G., & Marsisno, W. (2018). Availability of Infrastructure for Poverty in Indonesia: Spatial Panel Data Analysis. *Economics and Finance in Indonesia*, 64(2), 157–180. <https://www.researchgate.net/publication/330657110>
- Prawesti, A. P., & Hermawan, R. (2017). Infrastructural Development and Poverty Reduction in Java , Indonesia 2002-2012. *Journal of Public Administration Studies*, 1(3), 71–79.
- Rohmah, C., Suratno, & Kuswanto. (2021). The Effect of Education and Unemployment on Poverty in Jambi Province. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(1), 31–43.
- Santos, M. E., Dabus, C., & Delbianco, F. (2019). Growth and Poverty Revisited from a Multidimensional Perspective. *The Journal of Development Studies*, 55(2), 260–277.

- Sari, N. I. (2018). Determinan Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 – 2014. *Economics Development Analysis Journal*, 7(2), 128–136.
- Sehrawat, M., & Giri, A. K. (2018). The Impact of Financial Development, Economic Growth, Income Inequality on Poverty: Evidence from India,". *Empirical Economics*, 55(4), 1585–1602.
- Siregar, E. S., & Batubara, I. (2022). The Effect of Unemployment on Poverty In Mandailing Natal. *Adpebi International Journal of Multidisciplinary Sciences*, 1(1), 120–125.
- Škare, M., & Družeta, R. P. (2016). Poverty and economic growth: a review. *Technological and Economic Development of Economy*, 22(1), 156–175. <https://doi.org/10.3846/20294913.2015.1125965>
- Sotomayor, O. J. (2021). Can the Minimum Wage Reduce Poverty and Inequality in the Developing World? Evidence from Brazil. *World Development*, 138, 105–182. <https://doi.org/doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105182>
- Trimaya, A. (2014). Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 5(1), 11–20. <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/448>
- Yamada, K. (2016). Tracing the Impact of Large Minimum Wage Changes on Household Welfare in Indonesia. *European Economic Review*, 87, 287–303. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2016.05.008>